

Katalog: 4301003.13

Profil
PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
2022



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Profil

PENDIDIKAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

2022

<https://sumbar.bps.go.id>



Profil

PENDIDIKAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

2022

ISSN : 2723-1801
No. Publikasi : 13000.2352
Katalog : 4301003.13

Ukuran buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah halaman : xii + 60

Naskah:

BPS Provinsi Sumatera Barat

Penyunting:

BPS Provinsi Sumatera Barat

Gambar Kulit:

BPS Provinsi Sumatera Barat

Ilustrasi Kulit:

Sekolah di Indonesia

Diterbitkan Oleh:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Dicetak oleh:

CV. Graphic Dwipa

Sumber Ilustrasi:

freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 43 huruf b).

TIM PENYUSUN

Pengarah : Sugeng Arianto, M.Si.

Penanggung Jawab : Mila Artati, S.ST, M.Stat.

Penyunting : Ir. Yuni Marlita
Lidya Sri Yeni, S.ST., M.Si.
Deswaty, S.ST.
Nurwinda Anggun Primaharti, S.ST.

Pengolah Data dan Penulis Naskah : Mila Artati, S.ST, M.Stat.
Yanda Frimahatta, S.ST.

Penata Letak : Yanda Frimahatta, S.ST.

Gambar Kulit dan Infografis : Yanda Frimahatta, S.ST.

KATA PENGANTAR

Pendidikan merupakan proses pembelajaran pengetahuan dan keterampilan melalui pengajaran dan pelatihan. Melalui pendidikan diharapkan terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, sehingga sudah seharusnya program pendidikan ini direncanakan dengan sebaik-baiknya.

Profil Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 2022 merupakan publikasi rutin yang diterbitkan BPS Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2015. Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari olahan Publikasi Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2023 serta olahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022. Data yang disajikan antara lain sarana prasarana sekolah, tingkat partisipasi sekolah, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan putus sekolah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran dari pengguna data akan kami pertimbangkan untuk meningkatkan kualitas publikasi di masa akan datang.

Padang, September 2023
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Barat



Sugeng Arianto, M.Si.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Bab 1. Pendahuluan	1
1.1 Umum	3
1.2 Tujuan	6
1.3 Sistematika Penulisan	6
Bab 2. Metodologi	9
2.1 Sumber Data	11
2.2 Konsep dan Definisi	11
Bab 3. Sarana dan Prasarana Pendidikan	17
3.1 Sarana Pendidikan	19
3.2 Pendidikan Anak Usia Dini	23
3.3 Partisipasi Sekolah	28
3.4 Angka Partisipasi Sekolah	31
3.5 Angka Partisipasi Kasar	35

3.6 Angka Partisipasi Murni	38
Bab 4. Hasil Pembangunan Pendidikan	41
4.1 Angka Melek Huruf	44
4.2 Rata-rata Lama Sekolah	46
4.3 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan ...	48
4.4 Angka Putus Sekolah	50
Bab 5. Penutup	55
Daftar Pustaka	59

<https://sumbar.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1.1.	Perkembangan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat, 2021/2022 dan 2022/2023	20
Tabel 3.1.2.	Jumlah dan Rasio Murid Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat, 2022.....	21
Tabel 3.2.1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Anak Usia 3-5 Tahun dan 3-6 Tahun Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat, 2022	26
Tabel 3.2.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Anak Usia 3-5 Tahun dan 3-6 Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat, 2022	27
Tabel 3.3.1.	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas Menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Partisipasi Sekolah di Provinsi Sumatera Barat, 2022	30
Tabel 3.4.1.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Daerah Tempat Tinggal, Status Ekonomi Rumah Tangga, dan Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Barat, 2022	33
Tabel 3.5.1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Daerah Tempat Tnggal, Jenis Kelamin, dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat, 2022	36

Tabel 3.6.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat, 2022	39
Tabel 4.1.1.	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Barat, 2022	45
Tabel 4.1.2.	Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan, Tipe Daerah dan Status Ekonomi Rumah Tangga di Provinsi Sumatera Barat, 2022	46

<https://sumbar.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.2.1. Persentase Anak Usia 0-10 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Tahun Ajaran 2021/2022 atau Tahun Ajaran Sebelumnya Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Barat, 2022	25
Gambar 3.4.1. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Barat, 2022.....	32
Gambar 4.2.1. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat, 2022.....	47
Gambar 4.3.1. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Sumatera Barat, 2022	48
Gambar 4.3.2. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Sumatera Barat, 2022	49

<https://sumbar.bps.go.id>

Bab 1

PENDAHULUAN

04

PENDIDIKAN
BERKUALITAS



Tujuan 4 SDGs

Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata
Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat
untuk Semua



Bab 1

PENDAHULUAN

1.1 UMUM

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup. Makin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat diharapkan semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Semakin baik kualitas sumber daya manusianya akan lebih memberikan jaminan untuk hidup yang lebih baik.



Tujuan pembangunan di bidang pendidikan tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) khususnya pada tujuan keempat yaitu pendidikan berkualitas - menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua (Bappenas, 2021). Untuk mewujudkannya, pemerintah telah melakukan berbagai langkah dalam perbaikan pendidikan bangsa, yaitu dengan menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung

jawab untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut sesuai dengan amanat UUD 1945 yang menyiratkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selain itu, upaya yang terus dilakukan merupakan perwujudan dari visi pendidikan Indonesia 2035 pada Peta Jalan Pendidikan 2020–2035, yaitu membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup, unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila.

Pendidikan dalam arti luas adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Pendidikan juga merupakan hal yang sangat penting bagi kesejahteraan anak dan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan dan ketidaksetaraan (UNICEF, 2012).

Disamping itu, kemajuan teknologi juga menuntut tersedianya sumber daya manusia yang mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja dan mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Untuk itu, mutu pendidikan menjadi faktor penting agar ada kecocokan antara pendidikan dan lapangan kerja sehingga pengangguran dapat berkurang. Mutu pendidikan dapat diukur melalui ketersediaan tenaga pengajar yang memiliki standar kompetensi guru.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan misalnya

dengan mengalokasikan data untuk sektor pendidikan, memberikan tunjangan profesi guru, bantuan operasional sekolah, mengembangkan akses terhadap pendidikan anak usia dini, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, memperbaiki kurikulum serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik. Sejak tahun 1994 pemerintah juga telah melaksanakan program wajib belajar 9 tahun yaitu 6 tahun di pendidikan dasar ditambah 3 tahun pada pendidikan menengah. Semakin lamanya usia wajib belajar ini diharapkan tingkat pendidikan anak semakin membaik dan tentunya akan berdampak pada tingkat kesejahteraan penduduk.

Pemantauan perkembangan pembangunan manusia dalam bidang pendidikan dapat dilihat dengan pendekatan indikator pendidikan. Indikator pendidikan yang akan dibahas antara lain: kemampuan intelektual dasar yang meliputi Angka Partisipasi untuk PAUD, dan Angka Melek Huruf (AMH) dan *Mean Years of Schooling* (MYS) atau rata-rata lama sekolah, partisipasi masyarakat dalam pendidikan meliputi Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).



Ada dua tujuan pokok penulisan Publikasi Profil Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 2022, yaitu:

1. Untuk mengetahui indikator proses pembangunan manusia yang telah dilakukan oleh Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 yang diwakili dengan data tentang sarana dan prasarana pendidikan seperti jumlah guru, sekolah, dan murid.
2. Untuk mengetahui indikator hasil pembangunan di bidang pendidikan yang dicapai oleh Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 yang diwakili dengan indikator angka partisipasi sekolah, angka melek huruf, tingkat pendidikan yang ditamatkan, dan rata-rata lama sekolah.

Pembahasan utama dirinci ke dalam lima bab sesuai tema besar profil statistik pendidikan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I berisi latar belakang penyusunan publikasi, tujuan dan sistematika penulisan.
2. Bab II metodologi, berisi tentang ruang lingkup dan konsep/definisi yang digunakan penulisan publikasi.
3. Bab III menjelaskan tentang sarana dan prasarana pendidikan yang mencakup informasi umum tentang sarana dan prasarana pendidikan yang memuat dua bahasan utama, yaitu partisipasi pendidikan anak usia dini dan partisipasi sekolah dasar dan menengah.
4. Bab IV menyajikan pembahasan mengenai hasil pembangunan pendidikan yang tercermin dari indikator angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Selain itu, indikator

1.2

TUJUAN

1.3

SISTEMATIKA

PENULISAN

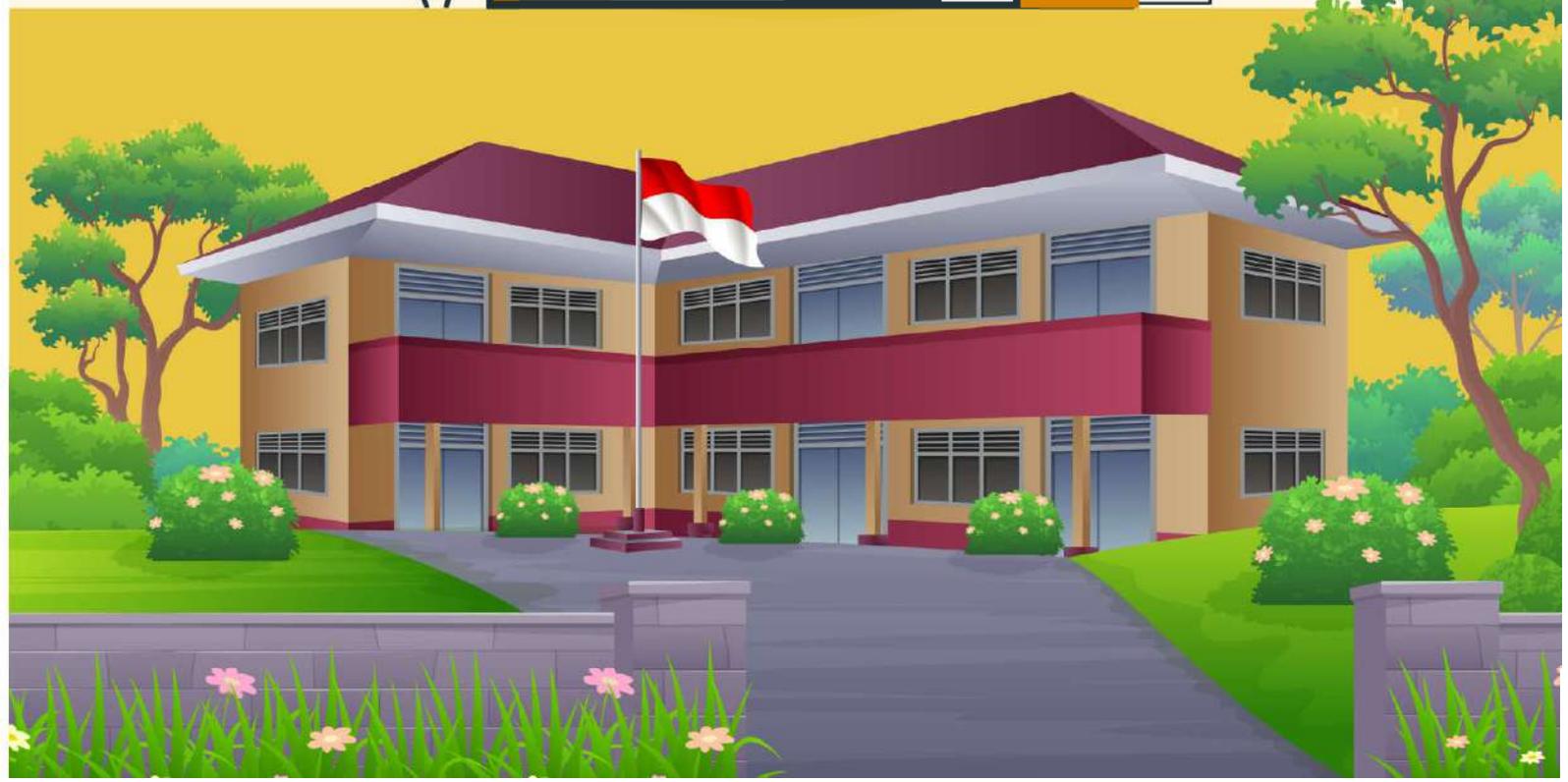
angka putus sekolah juga disajikan untuk melihat adanya hambatan/kegagalan pembangunan pendidikan.

5. Bab V penutup, berisi ringkasan tentang kondisi pendidikan penduduk Sumatera Barat secara umum.

<https://sumbar.bps.go.id>

Bab 2

METODOLOGI



Bab 2

METODOLOGI

2.1

SUMBER

DATA

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan dan penyusunan indikator pendidikan dalam publikasi ini bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret tahun 2022 yang dilaksanakan oleh BPS. Selain itu, pada publikasi ini juga menggunakan data yang bersumber dari instansi terkait di lingkungan Provinsi Sumatera Barat yang diolah dari publikasi Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2023.

2.2

KONSEP

DAN

DEFINISI

Konsep serta definisi dari indikator-indikator yang digunakan disajikan di bawah ini.

Penduduk adalah setiap orang yang menetap di suatu wilayah selama satu tahun atau lebih dan atau yang berdomisili kurang dari satu tahun tetapi bertujuan untuk menetap lebih dari satu tahun.

Rumah Tangga Biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan dan biasanya makan dari satu dapur. Konsep satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Kepala Rumah Tangga (KRT) adalah salah seorang dari Anggota Rumah Tangga (ART) yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.

Anggota Rumah Tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari satu tahun dan tidak berniat pindah atau bertempat tinggal kurang dari satu tahun tetapi berniat menetap.

Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah bepergian selama satu tahun atau lebih, atau kurang dari satu tahun tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama satu tahun atau lebih). Di sisi lain, orang yang telah satu tahun atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari satu tahun tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

Rasio murid-guru adalah perbandingan antara jumlah murid terhadap jumlah guru.

Rasio kelas-guru adalah perbandingan antara jumlah kelas pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah guru.

Rasio murid-kelas adalah perbandingan jumlah murid dalam suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah kelas yang tersedia.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SMA/MA/ sederajat dan Perguruan Tinggi (PT).

Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Meliputi pendidikan

kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Partisipasi sekolah yaitu menunjukkan keadaan status pendidikan seseorang saat ini. Partisipasi sekolah terbagi menjadi tiga yaitu:

Tidak/belum pernah sekolah adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tamat Taman Kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

Masih bersekolah adalah apabila terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal dan non formal (Paket A, Paket B dan Paket C), baik yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Instansi Negeri lain maupun Instansi Swasta.

Tidak bersekolah lagi adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Pendidikan pra sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal.

Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B dan paket C.

Tamat sekolah adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah.

Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki adalah jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki oleh seseorang yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang sedang diduduki oleh

seseorang yang masih bersekolah.

SD/MI meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat.

SMP/MTs meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP Kejuruan dan sederajat.

SMA/MA meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah dan sederajat.

Perguruan Tinggi (PT) meliputi jenjang pendidikan Diploma I, II, III dan IV dan sederajat.

Dapat membaca dan menulis artinya dapat membaca dan menulis kata/kalimat sederhana dalam aksara tertentu.

1. **Huruf latin/alfabet**, bila responden dapat membaca dan menulis huruf latin/alfabet.
2. **Huruf arab/hijaiyah**, bila responden dapat membaca dan menulis huruf arab/hijaiyah.
3. **Huruf lainnya**, bila responden dapat membaca dan menulis selain huruf latin dan huruf arab seperti huruf jawa, kanji, cina, dan sebagainya.

Tidak dapat membaca dan menulis, bila responden tidak dapat membaca dan menulis, baik huruf latin, huruf arab maupun huruf lainnya.

Catatan:

1. Orang buta yang dapat membaca dan menulis huruf braille digolongkan dapat membaca dan menulis huruf latin.

2. Orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis, kemudian karena cacatnya tidak dapat membaca dan menulis digolongkan dapat membaca dan menulis.
3. Orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis atau sebaliknya, dianggap tidak dapat membaca dan menulis.

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis huruf Latin atau huruf arab atau huruf lainnya.

Rata-Rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Angka Putus Sekolah (APTs) adalah persentase siswa/murid dengan jenjang pendidikan tertentu yang tidak lagi mengikuti pendidikan pada jenjang tersebut.

Bab 3

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN



Angka Partisipasi Kasar (APK)

SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat	Perguruan Tinggi
108,47	92,57	90,66	36,69

APK yang nilainya diatas 100 berarti masih terdapat murid di suatu jenjang pendidikan yang berusia diluar kelompok umur yang bersesuaian dengan jenjang pendidikannya.

Angka Partisipasi Murni (APM)

APM menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu



Bab 3

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

3.1

SARANA PENDIDIKAN

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, penyelenggara pendidikan berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Berdasarkan Pasal 45 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Gambaran tentang kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Provinsi Sumatera Barat akan dibahas pada bab ini, yaitu jumlah sekolah, murid, dan guru.



Tabel 3.1.1. Perkembangan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat, 2021/2022 dan 2022/2023

Lembaga Pendidikan	Jumlah		Pertumbuhan (%)
	2021/2022	2022/2023	
(1)	(2)	(3)	(4)
TK/Sejenisnya			
Jumlah	2 839	2 913	2,61
Jumlah Murid	94 749	98 168	3,61
Jumlah Guru	9 779	10 543	7,81
SD/Sederajat			
Jumlah	4 397	4 419	0,50
Jumlah Murid	634 628	624 446	-1,60
Jumlah Guru	47 956	49 385	2,98
SMP/Sederajat			
Jumlah	1 256	1 272	1,27
Jumlah Murid	305 680	298 720	-2,28
Jumlah Guru	27 487	28 235	2,72
SMA/Sederajat			
Jumlah	764	773	0,26
Jumlah Murid	287 207	278 813	1,54
Jumlah Guru	23 527	23 854	2,29

Sumber: Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2023 (diolah)

Tabel 3.1.1 menunjukkan perkembangan jumlah sekolah kondisi dua tahun terakhir di Provinsi Sumatera Barat. Semua jenjang pendidikan mengalami kenaikan jumlah bangunan sekolah. Kenaikan tertinggi pada jenjang pendidikan TK/Sejenisnya, yaitu sebesar 2,61 persen. Pada jenjang pendidikan SD/sederajat mengalami kenaikan sebesar 0,50 persen, jenjang pendidikan SMP/Sederajat mengalami kenaikan sebesar 1,27 persen dan jenjang pendidikan SMA/sederajat mengalami kenaikan sebesar 0,26 persen.

Pertumbuhan jumlah sekolah biasanya diiringi dengan peningkatan jumlah murid. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat selama dua tahun terakhir, pertumbuhan jumlah murid terjadi pada jenjang TK/Sejenisnya dan pendidikan SMA/ sederajat. Sementara itu, persentase jumlah murid pada jenjang pendidikan SD/ sederajat dan SMP/ Sederajat justru menurun. Penurunan jumlah murid tertinggi terjadi pada jenjang SD/ sederajat yaitu sebesar 1,60 persen dan diikuti jenjang pendidikan SMP/ Sederajat sebesar 2,20 persen.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru pada pasal 17 disebutkan guru tetap pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang minimal jumlah siswa terhadap gurunya sebagai berikut: jenjang TK/RA = 15:1; jenjang SD/ sederajat = 20:1; jenjang MI/ sederajat = 15:1; jenjang SMP/ sederajat = 20:1; jenjang MTs/ sederajat = 15:1; jenjang SMA/ sederajat = 20:1; jenjang MA/ sederajat = 15:1; jenjang SMK/ sederajat = 15:1; jenjang MAK/ sederajat = 12:1. Beban kerja guru dapat dilihat dari rasio murid-guru. Rasio murid-guru adalah perbandingan antara jumlah murid terhadap jumlah guru (baik guru layak mengajar maupun tidak) pada jenjang pendidikan tertentu.

Tabel 3.1.2. Jumlah dan Rasio Murid Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat, 2022

Jenjang Pendidikan	Jumlah		Rasio
	Murid	Guru	
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/ sederajat	624 446	49 385	13
SMP/ sederajat	298 720	28 235	11
SMA/ sederajat	278 813	23 854	12

Sumber: Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2023 (diolah)

Rasio murid-guru mencerminkan rata-rata jumlah murid yang dihadapi oleh seorang guru. Data Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat menunjukkan rasio murid-guru semua jenjang

pendidikan untuk TA 2022/2023 sudah memenuhi standar ideal. Angka rasio murid-guru yang besar mengindikasikan bahwa satu orang guru harus bertanggung jawab terhadap banyak murid. Dengan kata lain, semakin besar rasio murid-guru, semakin kecil akses murid terhadap guru. Secara umum dapat diasumsikan bahwa rasio murid-guru yang rendah menandakan kelas yang lebih kecil (UNESCO, 2009). Hal ini memungkinkan guru untuk lebih memperhatikan siswa secara individu sehingga mendukung prestasi siswa menjadi lebih baik dan dapat menjadikan suasana belajar mengajar yang nyaman sehingga hasil belajar mengajarnya lebih optimal.

Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini juga tercantum dalam tujuan SDGs keempat yaitu menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua. Sasaran utama pembangunan bidang pendidikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah pemenuhan hak seluruh warga negara untuk setidaknya menyelesaikan pendidikan dasar yang ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah.

Target yang ditetapkan pada rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut juga sejalan dengan visi dan misi daerah yang dituangkan di dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Adapun visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat adalah "Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani yang Unggul dan Berkelanjutan". Visi ini didukung oleh 7 misi yang akan dicapai pada akhir masa pemerintahan Gubernur Mahyeldi yang berakhir di tahun 2026. Pada misi ke-1 yang berbunyi "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing" tertulis tujuan agar masyarakat Sumatera Barat harus memperoleh pendidikan yang bermutu, yang berorientasi pada penguatan kepribadian yang bermoral, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap beradab sehingga menjadi manusia yang kreatif, inovatif dan mampu

bersaing ditingkat nasional dan internasional.

Apabila dilihat dengan hasil yang dicapai di Provinsi Sumatera Barat melalui indikator pendidikan yang diolah dari Susenas 2022 dapat dilihat sejauh mana capaian provinsi dapat mencapai target renstra nasional dan target kinerja yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Indikator partisipasi sekolah digunakan untuk memantau program pendidikan yang telah digulirkan pemerintah. Partisipasi sekolah menggambarkan efektifitas program pendidikan dalam menyerap potensi pendidikan yang ada di masyarakat. Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin efektif suatu program.

3.2

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Berbagai penelitian mengungkapkan pentingnya pendidikan usia dini bagi perkembangan karakter anak-anak. Para psikolog, neurosains, dan pakar pendidikan pun mengamini hal ini. Salah satunya Robert Fulghum (1986), pendidik dan penulis asal Amerika Serikat, mengatakan fondasi karakter anak dapat dibangun sejak mereka masuk pendidikan anak usia dini (PAUD). Pendidikan yang diberikan untuk anak usia 3-6 tahun tidak hanya bertujuan mengenalkan anak pada bidang-bidang pelajaran ataupun melatihnya berinteraksi dengan anak sebaya. Lebih jauh dari itu, PAUD memiliki fungsi utama mengembangkan semua aspek perkembangan anak, meliputi perkembangan kognitif, bahasa, fisik (motorik kasar dan halus), sosial dan emosional.

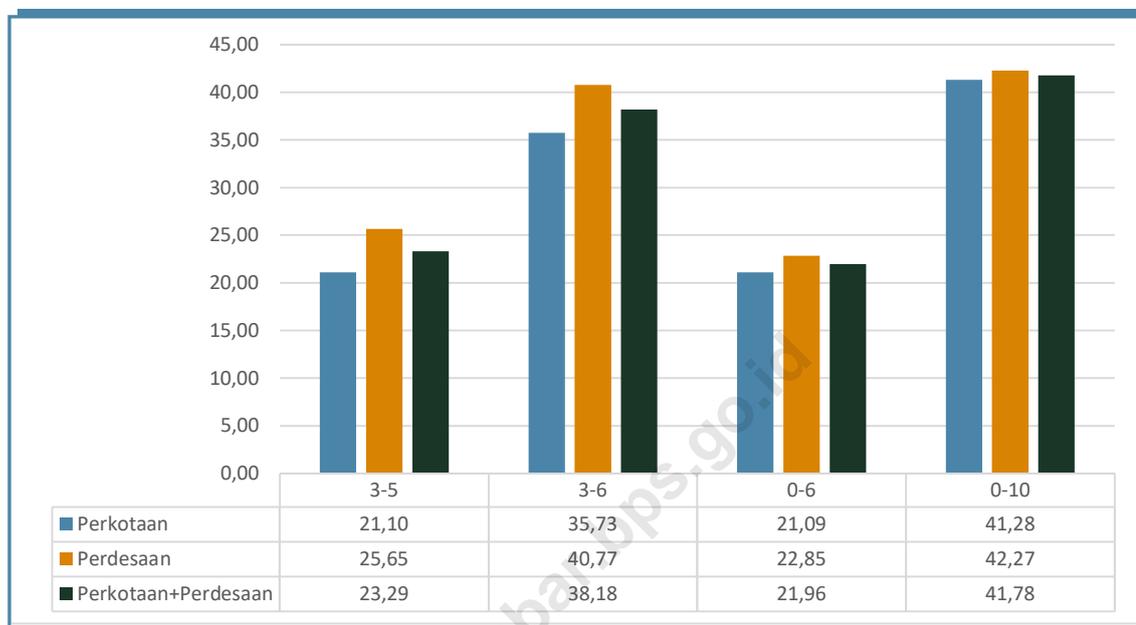
Melihat pentingnya pembentukan anak sebagai dasar penentu kualitas bangsa di masa mendatang, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) memberikan dukungan penuh dengan pendidikan awal pada anak melalui program wajib Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) satu tahun pra-SD dengan penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Selanjutnya, dalam peningkatan mutu kelembagaan PAUD, pemerintah mengatur tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 84 Tahun 2014 dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Hal-hal mengenai syarat pendirian PAUD, standar tingkat pencapaian pengembangan anak pada PAUD, standar isi, proses, dan penilaian PAUD, tenaga pendidik, hingga proses penutupan PAUD telah diatur secara lengkap pada peraturan tersebut. Pemerintah juga telah merintis program PAUD baru bagi desa-desa yang belum terdapat layanan anak usia dini, sejalan dengan program satu desa satu PAUD.

Pengalaman belajar di PAUD akan membantu anak untuk lebih siap dalam menerima pelajaran formal di bangku pendidikan selanjutnya (SD) sehingga sedikit anak yang mengulang kelas. Hal ini yang menjadi salah satu alasan UNESCO merekomendasikan setiap anak mendapatkan pendidikan anak usia dini pada usia pra-sekolah. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal (TK/RA/sederajat), non formal (KB/TPA/sejenisnya), dan/atau informal (keluarga/lingkungan). Pendidikan pada jenjang ini dapat disebut sebagai pendidikan pra-SD.



Gambar 3.2.1. Persentase Anak Usia 0-10 Tahun yang Pernah/ Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Tahun Ajaran 2021/2022 atau Tahun Ajaran Sebelumnya Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Barat, 2022



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

Pada Gambar 3.2.1, pada tahun ajaran 2021/2022 atau tahun ajaran sebelumnya, persentase anak usia 0-6 tahun yang pernah/sedang mengikuti pendidikan pra sekolah di Provinsi Sumatera Barat mencapai 21,96 persen. Berdasarkan daerah tempat tinggal, partisipasi pra sekolah usia 0-6 tahun di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan, yaitu 22,85 persen di perdesaan dan 21,09 persen di perkotaan. Selisih persentase antara daerah tempat tinggal ini relatif kecil.

Selain partisipasi PAUD, publikasi ini juga menyajikan indikator lain terkait PAUD yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang dapat dilihat pada Tabel 3.2.1 dan Tabel 3.2.2. APK PAUD merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang mengikuti pendidikan pra sekolah, baik Taman Kanak-Kanak (TK)/Bushtanul Athfal (BA)/Raudhatul Athfal (RA) maupun berbagai jenis PAUD lainnya (kecuali kelompok bermain dan tempat penitipan anak), terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang bersesuaian.

Pada perhitungan APK PAUD dan APM PAUD menggunakan dua kelompok umur yaitu 3-5 tahun dan 3-6 tahun. Perbedaan tersebut dilakukan karena kelompok umur 3-5 tahun sesuai dengan penetapan UNESCO dalam penghitungan indikator pendidikan usia dini, sedangkan kelompok umur 3-6 tahun sesuai yang tercantum dalam Renstra Kemdikbudristek 2020-2024. Oleh karena itu agar keterbandingan keduanya dapat dicermati, maka pengelompokan kedua jenis kelompok umur tetap dilakukan.

Tabel 3.2.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Anak Usia 3-5 Tahun dan 3-6 Tahun Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat, 2022

Daerah Tempat Tinggal	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD					
	Usia 3-5 Tahun			Usia 3-6 Tahun		
	Laki-laki	Perem- puan	Total	Laki-laki	Perem- puan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan	33,81	38,27	35,83	24,86	29,31	26,82
Perdesaan	40,90	39,27	40,08	29,05	29,90	29,47
Perkotaan + Perdesaan	37,04	38,78	37,87	26,80	29,61	28,11

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

Dalam mewujudkan penyediaan pendidikan pra SD (PAUD) yang bermutu untuk seluruh anak laki-laki dan perempuan baik di perkotaan maupun di perdesaan, pemerintah pusat dan daerah telah menyusun agenda pendidikan secara berkesinambungan. APK PAUD di Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 untuk kelompok umur 3-6 tahun sebesar 28,11 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari 10 anak usia 3-6 tahun, setidaknya terdapat 2-3 anak yang mengenyam pendidikan anak usia dini. Angka ini masih di bawah target pembangunan nasional yaitu sebesar 34,36 persen pada tahun 2024.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, APK PAUD anak perempuan baik kelompok umur 3-5 tahun maupun 3-6 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan APK PAUD anak laki-laki. Menurut daerah tempat tinggal, APK PAUD untuk kelompok umur 3-5 tahun perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan dengan nilai 40,08 persen untuk daerah perdesaan dan 35,83 persen untuk daerah perkotaan. Hal yang sama juga terjadi pada kelompok umur 3-6 tahun dengan nilai APK PAUD daerah perdesaan sebesar 29,47 persen dan daerah perkotaan sebesar 26,82 persen.

Tabel 3.2.2. Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Anak Usia 3-5 Tahun dan 3-6 Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat, 2022

Daerah Tempat Tinggal	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD					
	Usia 3-5 Tahun			Usia 3-6 Tahun		
	Laki-laki	Perem- puan	Total	Laki-laki	Perem- puan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan	17,18	22,69	19,67	24,67	28,66	26,43
Perdesaan	22,97	25,54	24,27	28,95	29,62	29,28
Perkotaan + Perdesaan	19,81	24,14	21,88	26,65	29,15	27,81

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

Proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang sedang mengikuti pendidikan prasekolah terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang bersesuaian dikenal sebagai APM PAUD. APM PAUD menunjukkan persentase anak yang benar-benar mengenyam PAUD pada usia yang bersesuaian. Sejalan dengan APK PAUD, APM PAUD anak perempuan lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki pada kelompok umur 3-5 tahun, yaitu 24,14 persen untuk APM PAUD perempuan dan 19,81 persen untuk APM PAUD laki-laki. Hal yang sama juga terjadi pada kelompok umur 3-6 tahun, APM PAUD anak perempuan (29,15 persen) lebih

tinggi dibandingkan APM PAUD anak laki-laki (26,65 persen).

Kesadaran orang tua untuk lebih memilih memasukkan anaknya, khususnya yang berusia 6 tahun, pada pendidikan prasekolah sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar mulai meningkat. Hal ini terlihat dari perbedaan yang cukup besar antara APM PAUD usia 3-5 tahun dan APM PAUD usia 3-6 tahun. Perbedaan tersebut menandakan bahwa kontribusi anak usia 6 tahun terhadap murid PAUD secara keseluruhan cukup besar. Di sisi lain, orang tua banyak yang lebih memahami bahwa usia 7 tahun merupakan usia ideal anak secara fisik maupun psikis untuk memasuki jenjang sekolah dasar.

Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, APM PAUD pada kelompok umur 3-5 tahun dan kelompok umur 3-6 tahun di perkotaan lebih rendah dibandingkan dengan daerah perdesaan. Hal ini sejalan dengan APK PAUD dimana daerah perkotaan lebih rendah dari daerah perdesaan.

Pada kelompok umur 3-5 tahun, selisih APK dan APM PAUD cenderung besar yaitu sekitar 15,99 persen, sedangkan untuk kelompok umur 3-6 tahun APK dan APM PAUD tidak berbeda signifikan, yaitu sebesar 0,3 persen. Hal ini juga mendukung pernyataan masih banyak orang tua yang memasukkan anaknya yang berusia 6 tahun ke PAUD sebelum memasuki pendidikan dasar.

3.3

PARTISIPASI SEKOLAH

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menghadapi perkembangan ilmu teknologi yang terjadi secara terus menerus. Dengan pendidikan yang baik akan dihasilkan tenaga kerja yang andal dan mampu melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka memacu pembangunan di berbagai bidang. Dengan pendidikan yang baik juga akan meningkatkan daya saing anak bangsa dalam kancah pergaulan global.

Memanfaatkan fasilitas pendidikan terbuka untuk semua penduduk, tidak hanya pada kelompok penduduk usia sekolah saja. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk menurut kategori partisipasi sekolah. Berdasarkan partisipasi sekolah, penduduk dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu: tidak/belum pernah sekolah, masih bersekolah, dan tidak bersekolah lagi.



Masih bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs), pendidikan menengah (SMA/SMK/MA), dan pendidikan tinggi (perguruan tinggi) maupun pendidikan non formal (Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Agama (Kemenag), instansi negeri lain maupun instansi swasta.

Tabel 3.3.1. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas Menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Partisipasi Sekolah di Provinsi Sumatera Barat, 2022

Daerah Tempat Tinggal; Jenis Kelamin	Partisipasi Sekolah Formal dan Non Formal			Jumlah
	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	3,73	28,27	68,00	100,00
Laki-laki	4,07	28,20	67,73	100,00
Perempuan	3,40	28,34	68,26	100,00
Perdesaan	4,30	26,48	69,22	100,00
Laki-laki	4,13	26,43	69,45	100,00
Perempuan	4,47	26,53	69,00	100,00
Perkotaan + Perdesaan	4,02	27,36	68,62	100,00
Laki-laki	4,10	27,29	68,61	100,00
Perempuan	3,94	27,42	68,63	100,00

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

Tabel 3.3.1 menunjukkan bahwa persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 4,02 persen, penduduk yang masih sekolah sebesar 27,36 persen dan penduduk yang sudah tidak bersekolah lagi sebesar 68,62 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk

usia 5 tahun ke atas yang belum/tidak menikmati pendidikan. Menurut daerah tempat tinggal, persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah bersekolah di perdesaan (4,30 persen) lebih tinggi daripada penduduk perkotaan (3,73 persen). Hal ini disebabkan oleh akses pendidikan penduduk perkotaan jauh lebih baik dibandingkan dengan penduduk perdesaan dan ketersediaan fasilitas pendidikan di daerah perkotaan lebih lengkap dan lebih memadai dibandingkan daerah perdesaan. Hal tersebut, tentunya perlu menjadi perhatian pemerintah yang lebih ekstra, khususnya untuk daerah perdesaan dalam hal meningkatkan kualitas dan fasilitas pendidikan agar partisipasi sekolah masyarakat dapat ditingkatkan.

Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang masih sekolah di daerah perkotaan (28,27 persen) relatif sedikit lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan (26,48 persen). Sementara itu, persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak bersekolah lagi di perkotaan sebesar 68,00 persen dan di perdesaan sebesar 68,62 persen. Faktor jenis kelamin juga berpengaruh terhadap akses masyarakat pada pendidikan. Tabel 3.3.1 menunjukkan bahwa secara keseluruhan persentase penduduk perempuan usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah (3,94 persen) relatif lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki (4,10 persen). Kesenjangan terhadap akses pendidikan antar jenis kelamin cenderung terjadi di daerah perkotaan. Di daerah perkotaan, persentase penduduk perempuan yang tidak/belum pernah sekolah tercatat sebesar 3,40 persen relatif lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki sebesar 4,07 persen. Sementara di daerah perdesaan, persentase penduduk perempuan yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 4,47 persen dan laki-laki sebesar 4,13 persen. Ini mengindikasikan bahwa di daerah perdesaan bagi laki-laki maupun perempuan hampir tidak terjadi kesenjangan dalam pendidikan.

3.4

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan persentase penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur tertentu.

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah dari penduduk usia tertentu. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan, misalnya pertumbuhan jumlah murid, lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Naiknya jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Partisipasi sekolah yang akan dibahas adalah partisipasi sekolah berkaitan dengan aktivitas pendidikan formal dan nonformal seseorang. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah.

Jfr gfv3.4.1. Askof Tf vnyaf ymai ot pfl Siss v Msnj Pjpr rñ hfs Pjpr uto dr vhmTvt rñyma r f ivf Dfvf , 2022



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

Gambar 3.4.1 memperlihatkan data APS menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Provinsi Sumatera Barat tahun 2022. Berdasarkan kelompok umur, APS pada kelompok umur 7-12 tahun yaitu 99,55 persen atau dapat dikatakan hampir semua anak usia 7-12 tahun sudah bersekolah. Semakin meningkat kelompok umur, nilai APS semakin menurun yang menandakan bahwa

semakin bertambah usia penduduk, partisipasi sekolahnya juga semakin menurun. Terlihat pada APS untuk kelompok umur yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan SMA/ sederajat sebesar 83,71 persen. Hal ini berarti hanya 83,71 persen anak usia 16-18 tahun yang melanjutkan ke sekolah menengah, disaat negara kita sedang gencar mengusahakan wajib belajar 12 tahun untuk seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali.

Tabel 3.4.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Daerah Tempat Tinggal, Status Ekonomi Rumah Tangga, dan Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Barat, 2022

Daerah Tempat Tinggal; Status Ekonomi Rumah Tangga	Partisipasi Sekolah Formal dan Non Formal			
	7-12	13-15	16-18	19-24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	99,34	96,76	88,84	40,61
40% bawah	98,94	96,48	87,00	31,27
40% menengah	99,67	97,33	88,67	40,46
20% atas	99,61	96,16	91,77	52,56
Perdesaan	99,75	96,27	78,65	30,65
40% bawah	99,73	95,86	77,54	25,09
40% menengah	99,73	96,95	77,93	35,25
20% atas	100,00	95,89	86,77	35,43
Perkotaan + Perdesaan	99,55	96,52	83,71	35,41
40% bawah	99,38	96,14	81,38	27,54
40% menengah	99,70	97,15	83,35	37,74
20% atas	99,76	96,06	90,26	46,46

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

Menurut tipe daerah, APS untuk daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan, kecuali pada kelompok umur 7-12 tahun. Dapat dilihat pula seiring bertambahnya usia, perbedaan APS perkotaan dan perdesaan pada kelompok umur 13-15 tahun hingga kelompok umur 19-24 tahun semakin besar. Perbedaan terbesar berada pada kelompok umur 16-18 tahun yang merupakan usia yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan SMA/ sederajat dengan perbedaan sekitar 10,19 persen.

Lebih lanjut, Tabel 3.4.1 menyajikan APS menurut kelompok umur dan status ekonomi rumah tangga. Pada tabel tersebut terlihat bahwa APS anak usia sekolah cenderung semakin meningkat seiring dengan peningkatan pengeluaran rumah tangga. Hal ini terlihat pada APS di kelompok umur 7-12 tahun, 16-18 tahun, dan 19-24 tahun. Pada ketiga kelompok umur ini, APS untuk anak-anak yang berasal dari pengeluaran rumah tangganya sedang dan tinggi, lebih tinggi dibandingkan APS untuk anak-anak yang pengeluaran rumah tangganya rendah. Ketimpangan yang cukup tinggi terjadi pada kelompok umur 19-24 tahun (usia mengenyam pendidikan tinggi) yaitu antara penduduk dengan status ekonomi rumah tangga 20 persen ke atas dengan penduduk dengan status ekonomi rumah tangga 40 persen ke bawah dengan selisih sebesar 18,93 persen.



Pada kelompok umur 7-12 tahun, APS yang berasal dari pendapatan rumah tangga sedang dan tinggi yaitu berturut-turut 99,70 persen dan 99,76 persen. Pada kelompok umur 13-15 tahun, APS yang berasal dari pendapatan rumah tangga sedang dan tinggi yaitu berturut-turut 97,15 persen dan 96,06 persen. Untuk kelompok umur 16-18 tahun dengan pengeluaran rumah tangga sedang dan tinggi, APS-nya berturut-turut 83,35 persen dan 90,26 persen. Sementara itu, pada kelompok umur 19-24 tahun, dengan pengeluaran rumah tangga sedang dan tinggi, APS-nya berturut-turut 37,74 persen dan 46,46 persen. Dilihat menurut daerah tempat tinggal, terdapat pola yang sama. Pada umumnya, semakin meningkat pengeluaran rumah tangga maka semakin meningkat pula APS anak usia sekolah. Pola tersebut terjadi di sebagian besar kelompok umur pendidikan pada daerah perkotaan maupun perdesaan.

3.5

ANGKA PARTISIPASI KASAR

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Jika jumlah populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang tertentu melebihi jumlah anak pada batas usia sekolah sesuai jenjang yang bersesuaian, maka nilai APK jenjang tersebut akan lebih dari 100. Fenomena ini disebabkan oleh beberapa hal seperti adanya pendaftaran siswa yang sekolah walaupun usianya belum mencapai usia sekolah yang bersesuaian, siswa yang telat masuk sekolah, atau banyaknya pengulangan kelas pada siswa. Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.5.1 yang ditampilkan menurut daerah tempat tinggal, jenis kelamin, dan jenjang pendidikan.

Tabel 3.5.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat, 2022

Daerah Tempat Tinggal; Jenis Kelamin	Angka Partisipasi Kasar (APK)			
	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	106,82	87,41	97,14	46,84
Laki-laki	107,82	89,61	93,01	41,21
Perempuan	105,83	84,90	101,12	52,99
Perdesaan	110,03	97,80	84,26	27,39
Laki-laki	110,78	98,49	79,17	23,95
Perempuan	109,24	97,02	89,16	31,05
Perkotaan + Perdesaan	108,47	92,57	90,66	36,69
Laki-laki	109,37	94,02	86,05	32,26
Perempuan	107,56	90,94	95,10	41,47

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

Pada Tabel 3.5.1 terlihat APK untuk SD/ sederajat secara keseluruhan baik laki-laki maupun perempuan dan daerah perkotaan maupun perdesaan, nilainya lebih dari 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa usia anak yang mengenyam pendidikan

SD/ sederajat masih ada yang berada di luar kelompok umur 7-12 tahun. Hal ini dikarenakan masih terdapat orang tua yang mendaftarkan anak yang belum mencapai usia 7 tahun langsung ke sekolah dasar tanpa melewati PAUD terlebih dahulu ataupun sudah melewati tetapi belum cukup umur. Selain itu, hal ini bisa terjadi karena masih tingginya murid yang tinggal kelas atau mengulang kelas.

Semakin tinggi jenjang pendidikan, nilai APK juga semakin rendah. APK jenjang pendidikan SMP/ sederajat pada tahun 2022 sebesar 92,57 persen, angka ini masih di bawah target pemenuhan RPJMN untuk tahun 2024 sebesar 95,43 persen untuk APK SMP/ sederajat. Hal yang sama, APK perguruan tinggi sebesar 36,69 persen juga masih di bawah target RPJMN 2024 sebesar 43,86 persen. Akan tetapi, APK SD/ sederajat (108,47 persen) dan APK SMA/ sederajat (90,66 persen) sudah mencapai target RPJMN 2020-2024 dengan target APK SD/ sederajat yaitu 106,71 persen dan APK SMA/ sederajat 84,02 persen.

Laki-laki dan perempuan di Provinsi Sumatera Barat memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Akan tetapi, terdapat perbedaan APK laki-laki dan perempuan pada setiap jenjang pendidikan. APK laki-laki lebih tinggi pada jenjang pendidikan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat, sedangkan APK perempuan lebih tinggi pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat dan perguruan tinggi.

APK di daerah perkotaan lebih tinggi daripada daerah perdesaan pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat dan perguruan tinggi. Sementara itu, untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat, APK di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Pada jenjang SD/ sederajat APK daerah perdesaan (110,03 persen) lebih tinggi daripada daerah perkotaan (106,82 persen). Hal ini memperlihatkan bahwa proporsi murid SD di perdesaan yang berusia kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun lebih besar daripada di perkotaan. Ini menunjukkan sistem pendidikan SD/ sederajat di perkotaan relatif sedikit lebih tertib dalam mengatur batas usia penerimaan murid.

3.6

ANGKA PARTISIPASI MURNI

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Sebagai gambaran APM SD/MI adalah proporsi jumlah murid SD/ sederajat yang berusia 7-12 tahun terhadap jumlah seluruh penduduk usia 7-12 tahun. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Tabel 3.6.1 menunjukkan APM jenjang pendidikan sekolah dasar sampai dengan APM jenjang perguruan tinggi. APM pada setiap jenjang pendidikan masih belum mencapai angka 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang berusia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut belum seluruhnya bersekolah sesuai dengan jenjangnya. Jika disandingkan dengan target capaian dari APM SD/ sederajat yang terdapat dalam RPJMD Sumatera Barat tahun 2016-2021, nilai capaian APM SD/ sederajat pada tahun 2022 belum melampaui target RPJMD tahun 2022 yaitu sebesar 100 persen.

Dapat dilihat bahwa pola APM memiliki kemiripan dengan pola APK pada tahun 2022. APM SD/ sederajat memiliki nilai paling tinggi kemudian semakin menurun seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Berdasarkan jenis kelamin, APM perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan APM laki-laki untuk setiap jenjang pendidikan. APM SD/ sederajat dan SMP/ sederajat merupakan APM yang memiliki selisih terkecil antar gender dengan selisih secara berturut-turut sebesar 0,04 persen dan 0,41 persen.

Tabel 3.6.1. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat, 2022

Daerah Tempat Tinggal; Jenis Kelamin	Angka Partisipasi Murni (APM)			
	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	98,45	79,32	74,41	36,19
Laki-laki	98,61	81,01	70,20	32,52
Perempuan	98,29	77,40	78,47	40,21
Perdesaan	99,12	78,40	62,43	21,24
Laki-laki	98,92	76,29	55,30	18,36
Perempuan	99,34	80,77	69,28	24,31
Perkotaan + Perdesaan	98,80	78,86	68,38	28,39
Laki-laki	98,78	78,67	62,70	25,17
Perempuan	98,82	79,08	73,84	31,86

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

Menurut wilayah tempat tinggal, APM perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan APM di perdesaan, kecuali pada APM SD/ sederajat. Nilai APM juga mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan.

Bab 4

HASIL PEMBANGUNAN PENDIDIKAN



Angka Melek Huruf

99,29

Masih terdapat sekitar 1 dari 100 penduduk Provinsi Sumatera Barat yang tidak bisa baca tulis



Rata-rata Lama Sekolah

9,51

Rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Sumatera Barat umur 15 tahun ke atas setara dengan kelas 3 SMP/ sederajat



Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

32,58 %

Sekitar 32 sampai 33 dari 100 penduduk Provinsi Sumatera Barat menamatkan pendidikan tertinggi SMA/ Sederajat



Bab 4

HASIL PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan katalisator dalam pembangunan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan yang keempat, yaitu pendidikan berkualitas - memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 - 2026 pada misi 1, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing, pemerintah menargetkan beberapa sasaran salah satunya di bidang pendidikan. Sasaran tersebut yaitu meningkatnya kualitas pendidikan yang diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, pemerintah melalui Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan target yang harus dicapai setiap tahunnya selama 2016-2021 sehingga tujuan pembangunan pendidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi untuk semua dapat tercapai.

Untuk melihat hasil pembangunan pendidikan dapat dilihat melalui beberapa indikator seperti angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Disamping itu angka putus sekolah juga akan disajikan untuk melihat di jenjang pendidikan mana pembangunan pendidikan terkendala.

4.1

ANGKA MELEK HURUF

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan persentase penduduk yang mampu membaca dan menulis minimal dalam kalimat sederhana yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. AMH diharapkan dapat mengukur seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi, sehingga bertambah pengetahuan dan keterampilan mereka, yang pada akhirnya penduduk tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup diri, keluarga, maupun negaranya di berbagai bidang kehidupan.

Oleh karena itu, AMH menjadi salah satu indikator pencapaian target SDGs, yang menjamin bahwa pada tahun 2030 semua remaja dan proporsi kelompok penduduk dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi. Kondisi keaksaraan di Provinsi Sumatera Barat ditunjukkan pada Tabel 4.1.1 yang menyajikan persentase penduduk melek huruf yang berumur 10 tahun ke atas menurut tipe daerah, jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan hasil Susenas Maret 2022.



Tabel 4.1.1. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Barat, 2022

Daerah Tempat Tinggal; Jenis Kelamin	Kelompok Umur					
	10-14	15-24	25-44	45+	10+	15+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan						
Laki-laki	99,33	100,00	99,89	99,40	99,69	99,74
Perempuan	99,95	99,86	99,82	98,35	99,34	99,27
Laki-laki + Perempuan	99,63	99,93	99,85	98,86	99,51	99,50
Perdesaan						
Laki-laki	99,72	99,82	99,92	99,00	99,58	99,57
Perempuan	99,67	99,79	99,92	96,65	98,72	98,60
Laki-laki + Perempuan	99,70	99,81	99,92	97,77	99,15	99,09
Perkotaan + Perdesaan						
Laki-laki	99,53	99,91	99,91	99,20	99,64	99,65
Perempuan	99,80	99,83	99,87	97,48	99,02	98,93
Laki-laki + Perempuan	99,66	99,87	99,89	98,30	99,33	99,29

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase penduduk 10 tahun ke atas yang melek huruf sebesar 99,33 persen, sedangkan untuk yang berumur 15 tahun ke atas sebesar 99,29 persen. Pencapaian AMH usia 45 tahun ke atas sudah cukup baik yaitu 99,30 persen. Melalui pencapaian ini, diharapkan kemampuan literasi penduduk Provinsi Sumatera Barat terhadap informasi yang tersedia semakin meningkat tajam, tidak hanya sekedar membaca tanpa meresapi dan memahami apa yang mereka baca. Dalam pembangunan berkelanjutan, kemampuan literasi penduduk bersifat *multiple effect*, dimana hal tersebut akan berdampak terhadap pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dilihat menurut tipe daerah, persentase penduduk melek huruf umur 10 tahun ke atas di daerah perdesaan sebesar 99,15 persen, lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan sebesar 99,51 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, AMH 10 tahun ke atas yang berjenis kelamin perempuan (99,02 persen) lebih rendah dibandingkan laki-laki (99,64 persen).

4.2

RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas merupakan cerminan tingkat pendidikan penduduk secara keseluruhan. Rata-rata lama sekolah juga merupakan indikator pendidikan yang diformulasikan oleh *United Nations Development Programs* (UNDP) pada tahun 1990 untuk penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena rata-rata lama sekolah dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Melalui indikator ini, dapat terlihat sampai sejauh mana kemampuan penduduk usia 15 tahun ke atas mengenyam pendidikan di bangku sekolah.

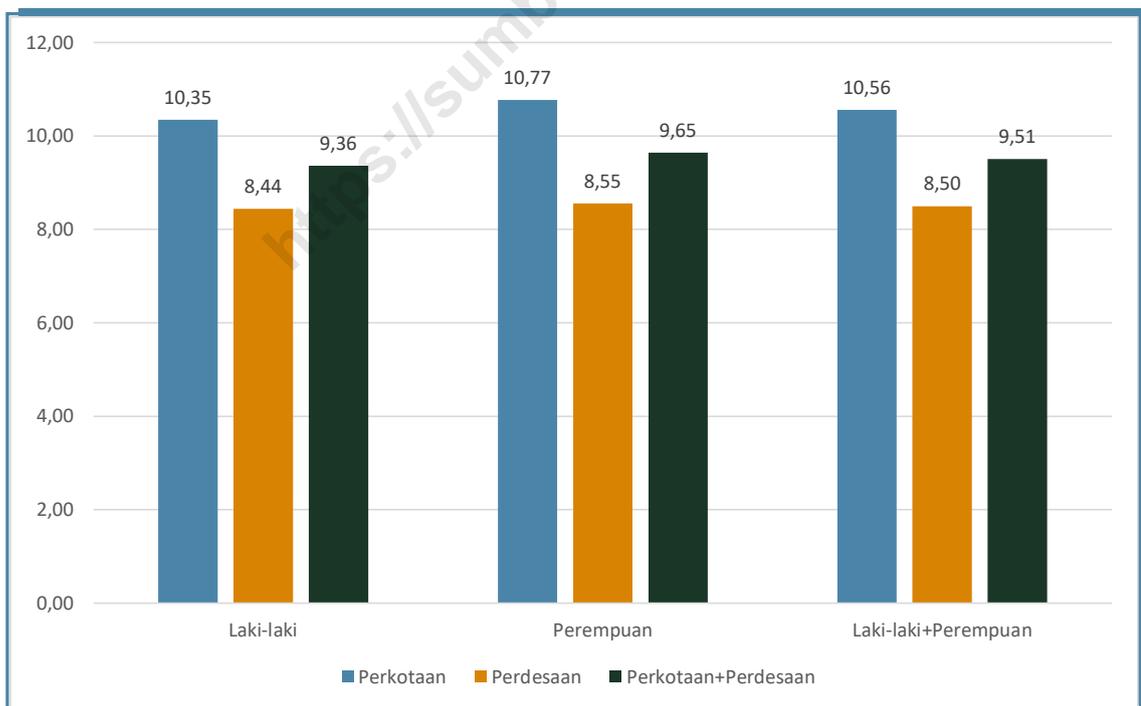
Dalam rangka mewujudkan pendidikan berkualitas, sasaran dan program pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah rata-rata lama sekolah sekurang-kurangnya mencapai 9,18 tahun pada tahun 2022.

Gambar 4.2.1 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas pada tahun 2022 mencapai 9,51 tahun (setara dengan kelas 3 SMP/ sederajat). Angka ini sudah melewati target RPJMD pada tahun 2022. Hal ini berarti usaha pemerintah untuk meningkatkan kemampuan penduduk untuk mengenyam pendidikan sudah menampakkan hasil yang nyata.

Gambar 4.2.1 juga menunjukkan tidak ada perbedaan

yang berarti antara rata-rata lama sekolah yang dicapai antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan (relatif sama yaitu lebih dari 9 tahun). Kondisi ini menunjukkan secara umum tidak ada isu gender pada rata-rata lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat. Rata-rata lama sekolah di perkotaan penduduk laki-laki sebesar 10,35 tahun dan perempuan sebesar 10,77 tahun, sedangkan di perdesaan rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki sebesar 8,44 tahun dan perempuan sebesar 8,55 tahun. Hal ini berarti secara rata-rata penduduk berumur 15 tahun ke atas di daerah perkotaan telah menuntaskan program wajib belajar 9 tahun atau tamat SMP (kelas IX) bahkan lebih, sedangkan di perdesaan secara rata-rata baru menamatkan pendidikan hingga SMP kelas VIII.

Jfr gfv4.2.1. Uf f-vf f Rfr f ai ot p l Tish h o dyrh 15 bfl s oi A fySis v Gfi v l bir uf brækkfphfs M sry Pi p r æ h n T v t ræyna r f i v f Df v f , 2022



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

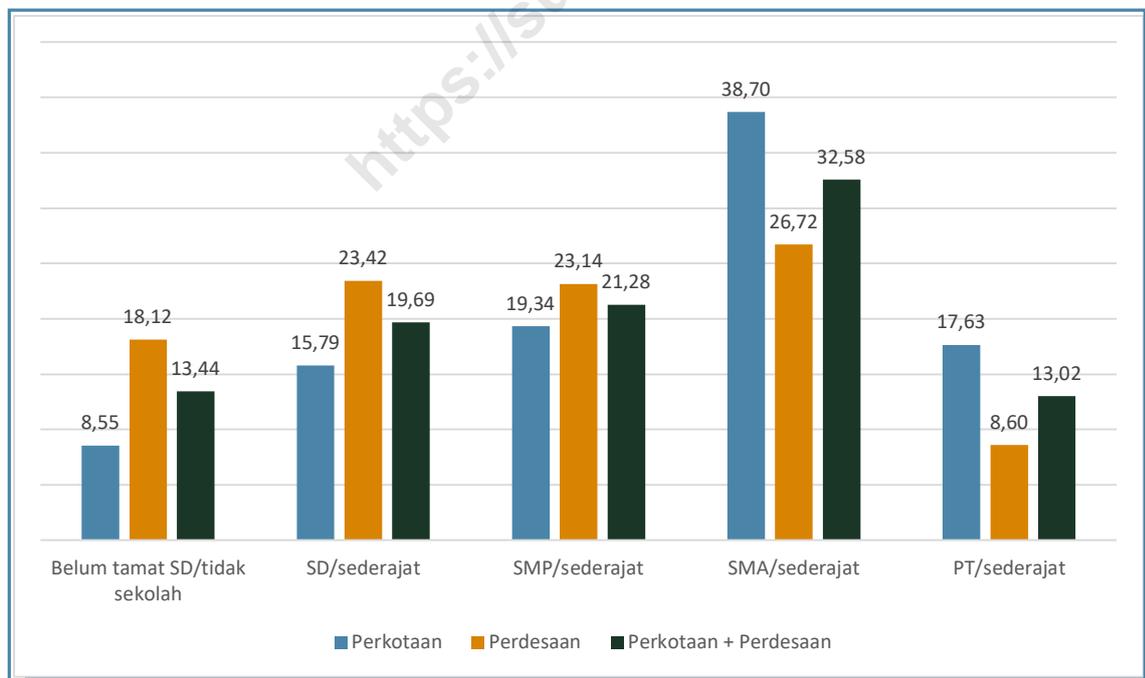
4.3

PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin banyak penduduk yang berpendidikan menunjukkan keadaan kualitas penduduk yang semakin baik. Selain itu, tingginya tingkat pendidikan yang dapat dicapai dapat mencerminkan taraf intelektualitas suatu masyarakat.

Gambaran kualitas Sumber Daya Masyarakat (SDM) Provinsi Sumatera Barat dilihat dari pendidikan yang ditamatkan disajikan pada gambar 4.3.1 dan 4.3.2 berturut-turut menurut daerah tempat tinggal dan menurut jenis kelamin.

Gambar 4.3.1. Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan oleh Penduduk Provinsi Sumatera Barat Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2022

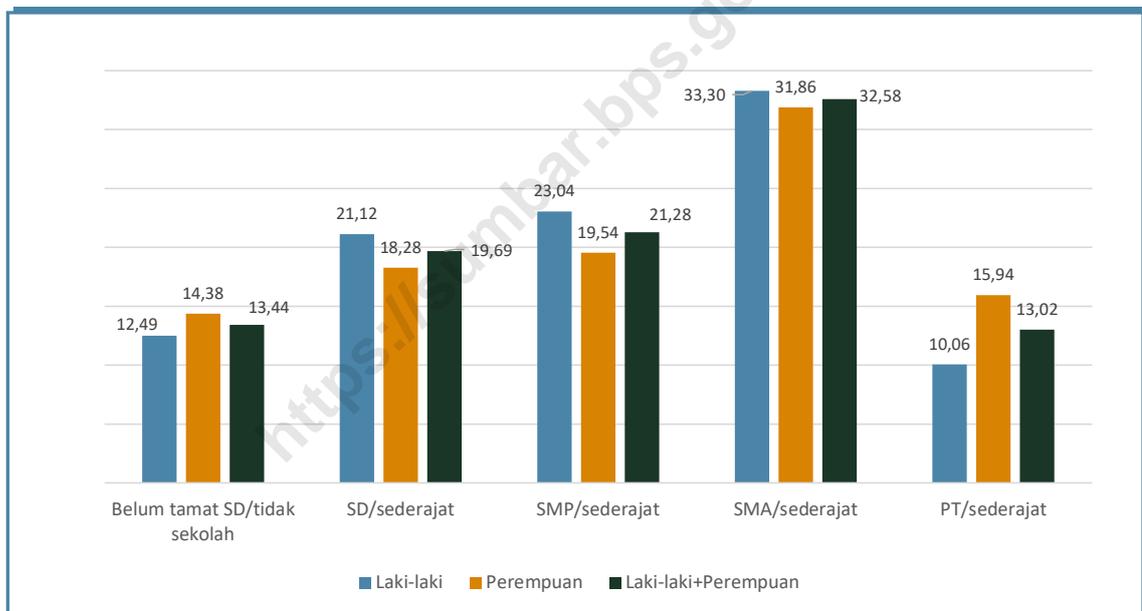


Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

Berdasarkan gambar 4.3.1 terlihat bahwa persentase tertinggi adalah penduduk yang tamat SMA/ sederajat sebesar

32,58 persen, diikuti tamat SMP/ sederajat sebesar 21,28 persen, dan tamat SD/ sederajat sebesar 19,69 persen, sedangkan persentase penduduk yang tamat perguruan tinggi sebesar 13,02 persen. Persentase penduduk di perdesaan yang tidak pernah sekolah dan tidak tamat SD lebih tinggi jika dibandingkan dengan perkotaan. Penduduk di perdesaan sebagian besar tamatan SMA (26,72 persen), sama halnya dengan penduduk perkotaan yang mampu menyelesaikan pendidikannya hingga tamat SMA/ sederajat (38,70 persen).

Jfr gfv4.3.2. Ti vj s fyi Tish h o dyrh 15 bfl s oi A fy Sis v Msm Pi fr n hfs Msrfsk Tishhrf s bi v rkkm fsk Gmfr f ofs hmTvt rnyma r f i v Df v , 2022



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

Jika dilihat menurut jenis kelamin (Gambar 4.3.2), pencapaian pendidikan antara laki-laki dan perempuan juga masih menunjukkan adanya kesenjangan. Hal ini terlihat dari lebih tingginya proporsi penduduk perempuan dibandingkan laki-laki yang belum/ tidak tamat SD. Persentase perempuan yang belum pernah atau tidak tamat pendidikan SD sebesar 14,38 persen, lebih tinggi dibandingkan persentase laki-laki sebesar 12,49 persen. Kondisi sebaliknya terjadi pada persentase perempuan yang tamat SD/ sederajat (18,28 persen), tamat SMP/ sederajat (19,54 persen) dan tamat SMA/ sederajat (31,86

persen) lebih rendah dibandingkan dengan persentase laki-laki tamat SD/ sederajat (21,12 persen), tamat SMP/ sederajat (23,04 persen), dan tamat SMA/ sederajat (33,30 persen). Pada jenjang perguruan tinggi (PT), persentase penduduk perempuan yang tamat PT lebih tinggi daripada penduduk laki-laki. Masing-masing sebesar 10,06 persen untuk laki-laki dan 15,94 persen untuk penduduk perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan Sumatera Barat relatif memiliki kemampuan yang lebih baik dalam pencapaian pendidikan lanjutan dibandingkan laki-laki.

4.4

ANGKA PUTUS SEKOLAH

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini dapat terjadi karena banyak faktor. Misalkan faktor kurangnya motivasi anak untuk bersekolah atau masalah keterbatasan ekonomi antara lain karena tidak ada biaya, bekerja, menikah/ mengurus rumah tangga, tidak tersedianya fasilitas pendidikan memadai, lokasi jauh dan lain-lain. Hal tersebut di atas merupakan alasan yang biasa dijumpai di kalangan masyarakat.

Tabel 4.4.1 menyajikan angka putus sekolah menurut wilayah tempat tinggal dan status ekonomi rumah tangga yang digolongkan ke dalam golongan pengeluaran rendah, menengah, dan tinggi serta menurut jenjang pendidikan. Dilihat secara total berdasarkan jenjang pendidikan, semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin tinggi pula angka putus sekolah. Angka putus sekolah di jenjang SD/ Sederajat sebesar 0,10 persen, SMP/ sederajat sebesar 0,60 persen dan pada jenjang SMA/ sederajat sebesar 1,28 persen.

Kenaikan angka putus sekolah dari jenjang SD sampai SMA juga terlihat di golongan pengeluaran rendah dan menengah, sedangkan golongan pengeluaran tinggi memiliki pola yang berbeda. Pada golongan pengeluaran tinggi ini, angka putus

sekolah tertinggi terdapat pada jenjang pendidikan SD/ sederajat. Jika dilihat dari daerah tempat tinggal, angka putus sekolah di perdesaan terjadi pada penduduk dengan pengeluaran tinggi. Sementara itu, pada daerah perkotaan angka putus sekolah sudah mencapai nol.

Tabel 4.2.1. Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan, Tipe Daerah dan Status Ekonomi Rumah Tangga di Provinsi Sumatera Barat, 2022

Daerah Tempat Tinggal; Status Ekonomi Rumah Tangga	Putus Sekolah		
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	0,00	0,40	1,01
40% bawah	0,00	0,74	0,97
40% menengah	0,00	0,26	1,68
20% atas	0,00	0,00	0,00
Perdesaan	0,19	0,80	1,58
40% bawah	0,20	1,08	0,91
40% menengah	0,16	0,68	2,72
20% atas	0,22	0,00	0,00
Perkotaan + Perdesaan	0,10	0,60	1,28
40% bawah	0,11	0,93	0,94
40% menengah	0,08	0,47	2,18
20% atas	0,09	0,00	0,00

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

Jika dilihat menurut golongan pengeluaran dan daerah tempat tinggal, pola angka putus sekolah di daerah perkotaan pada jenjang pendidikan SMP berbeda dengan angka putus sekolah pada jenjang SD dan SMA. Angka putus sekolah SMP di daerah perkotaan terbesar pada golongan pengeluaran rendah. Sementara itu pada jenjang SMA, angka putus sekolah di daerah perkotaan tertinggi pada golongan pengeluaran

menengah. Untuk daerah perdesaan, angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SD terjadi pada golongan pengeluaran tinggi, angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMP terjadi pada golongan pengeluaran rendah, dan angka putus sekolah pada jenjang SMA terjadi pada golongan pengeluaran menengah.

Tingginya angka putus sekolah pada kelompok pengeluaran rendah dan menengah sangat memprihatinkan karena pemerintah telah banyak meluncurkan program bantuan, yang bertujuan untuk menjaga agar anak-anak tetap bersekolah terutama yang berasal dari kelompok pengeluaran rendah. Misalkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), beasiswa dari pemerintah pusat dan daerah. Tingginya angka putus sekolah di golongan pengeluaran rendah juga mencerminkan bahwa program sekolah gratis untuk tingkat pendidikan dasar ternyata belum sepenuhnya terealisasi dan dinikmati oleh masyarakat luas.

<https://sumbar.dps.go.id>

Bab 5

PENUTUP



Bab 5

PENUTUP

Beberapa catatan penting yang dapat digunakan sebagai bahan/referensi bagi penentu kebijakan di Provinsi Sumatera Barat guna penyusunan rencana pembangunan bidang pendidikan ke depan, yaitu:

1. Partisipasi sekolah anak usia dini (3-6 tahun) yang ditunjukkan melalui nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Sumatera Barat baru mencapai 28,11 persen. Mengingat pentingnya upaya peningkatan kualitas manusia sejak usia dini, maka program ini perlu ditingkatkan.
2. Angka partisipasi sekolah, baik APS maupun APM di ketiga jenjang pendidikan (SD, SMP dan SMA) di Provinsi Sumatera Barat ada tendensi bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin kecil angka partisipasinya. Kesenjangan yang terjadi sebagai akibat rendahnya tingkat partisipasi pendidikan di daerah perdesaan.
3. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf di Provinsi Sumatera Barat hingga tahun 2022 mencapai 99,29 persen. Angka melek huruf di perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan.
4. Rata-rata lama sekolah yang dicapai oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 sebesar 9,51 tahun setara dengan menamatkan jenjang SMP.
5. Angka putus sekolah tertinggi terjadi pada jenjang pendidikan SMA di daerah perdesaan yaitu 1,58 persen. Untuk daerah perkotaan angka putus sekolah tertinggi juga terjadi pada jenjang pendidikan SMA yaitu 1,01 persen.

Daftar **PUSTAKA**



DAFTAR PUSTAKA

BPS. 2022. Statistik Pendidikan 2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik

BPS. 2022. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat 2022. Padang: CV Sarana Multi Abadi

BPS. 2022. Profil Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 2021. Padang: CV Sarana Multi Abadi

BPS. 2021. Statistik Pendidikan Indonesia 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik

BPS. 2023. Sumatera Barat Dalam Angka 2023. Padang: CV Sarana Multi Abadi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2008 Tentang Wajib Belajar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 Tentang Guru

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 (Revisi 18 Juli 2019)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2020–2024

Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Unicef Indonesia. 2012. Kajian Ringkas Edisi Oktober 2012: Pendidikan & Perkembangan Anak Usia Dini, Jakarta

United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO). 2009. Education Indicators Technical Guidelines.
Fulghum, Robert. 1990. All I Really Need to Know I Learned In Kindergarten. New York: Villard Books

<https://sumbar.bps.go.id>

ST2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**
Jl. Khatib Sulaiman No. 48 Padang 25135
Telp.: 0751- 442158/442159
Homepage: <http://sumbar.bps.go.id>
E-mail: bps1300@bps.go.id

